

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita nasional, pemerintah melakukan berbagai program dalam rangka penciptaan *good governance* dan pembangunan nasional yang merata. Dalam meningkatkan pembangunan nasional, semua potensi yang ada haruslah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Indonesia merupakan suatu Negara Kepulauan dengan Luas daratan 1.919.440 km² yang terdiri dari ±17.508 Pulau. Dengan daratan yang luas ini, pemerintah bisa memanfaatkan potensi yang ada. Pembangunan nasional merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu langkah awal untuk meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi daerah dapat diwujudkan melalui sumber-sumber pendapatan daerah. Berbagai daerah di Indonesia terus membangun daerahnya agar dapat menjadi lebih baik dan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi daerah perlu dilakukan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang bersumber dari perolehan pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah yang dipungut oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang.

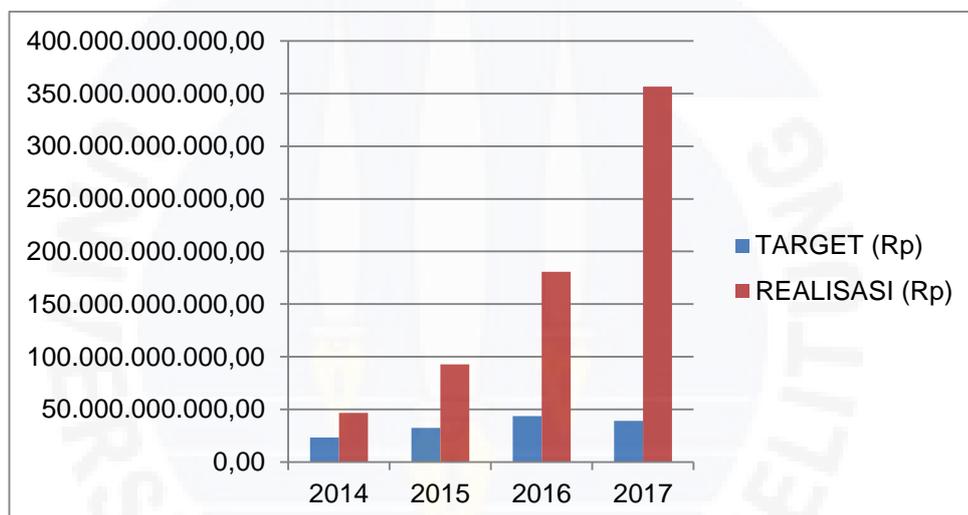
Penghasilan terbesar yang diterima suatu daerah berasal dari pungutan pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah perlu dilakukan upaya yang efektif dan efisien terhadap penerimaan pendapatan pajak daerah tersebut. Pendapatan asli daerah (PAD) memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Dalam pembangunan ekonomi, apabila semakin tinggi penerimaan pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah tersebut.

Pajak daerah menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang nantinya akan digunakan untuk keperluan daerah demi kemakmuran rakyat daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah (PERDA). Pemungutan pajak memang dapat mengurangi kekayaan dari wajib pajak, tetapi pajak yang diterima dari masyarakat juga akan digunakan untuk membantu pengeluaran-pengeluaran daerah dan kemudian akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu juga.

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Bangka Tengah merupakan unsur penunjang urusan pemerintah dalam bidang penerimaan keuangan yang meliputi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam salinan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 79 Tahun 2016, BPPRD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang keuangan yang meliputi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, pendapatan asli daerah lainnya, dan pendapatan dan transfer. Dalam peraturan Bupati Bangka Tengah ini juga disebutkan bahwa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) di

pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BPPRD mempunyai fungsi utama yaitu sebagai Badan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan yang meliputi pengelolaan pajak dan retribusi daerah, pendapatan asli daerah lainnya, dan dana pendapatan transfer.

Gambar I.1
Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014-2017



Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, Tahun 2018

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa selama 4 periode realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bangka Tengah selalu meningkat dan melebihi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017 terdapat penurunan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tetapi meskipun terdapat penurunan target, penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) meningkat secara drastis pada tahun tersebut.

Pada awal tahun 2014, pemerintah pusat membuat kebijakan tentang peralihan pajak bumi dan bangunan (PBB) menjadi pajak daerah. Tujuan dari peralihan pajak ini adalah untuk penggalan potensi penerimaan yang lebih optimal karena jaringan birokrasi yang lebih luas. Dengan adanya peralihan pajak ini, pemerintah daerah semakin memiliki peluang yang besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari daerah tersebut. Bangka Tengah merupakan salah satu daerah di Kepulauan Bangka Belitung dengan luas 2.126,76 km². Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Erwin selaku Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), beliau mengatakan bahwa dengan luas daerah yang sekarang ini, pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) sangat berpengaruh dalam penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan salah satu penyumbang penerimaan terbesar dari pajak daerah. Tidak berbeda dengan pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) juga merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan pendapatan asli daerah (PAD).

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P-2) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sangat berpotensi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) mengingat jumlah masyarakat Kabupaten Bangka Tengah tidaklah sedikit, dan masing-masing dari mereka pastilah memiliki tanah dan juga bangunan.

Tabel I.1
Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2014-2017

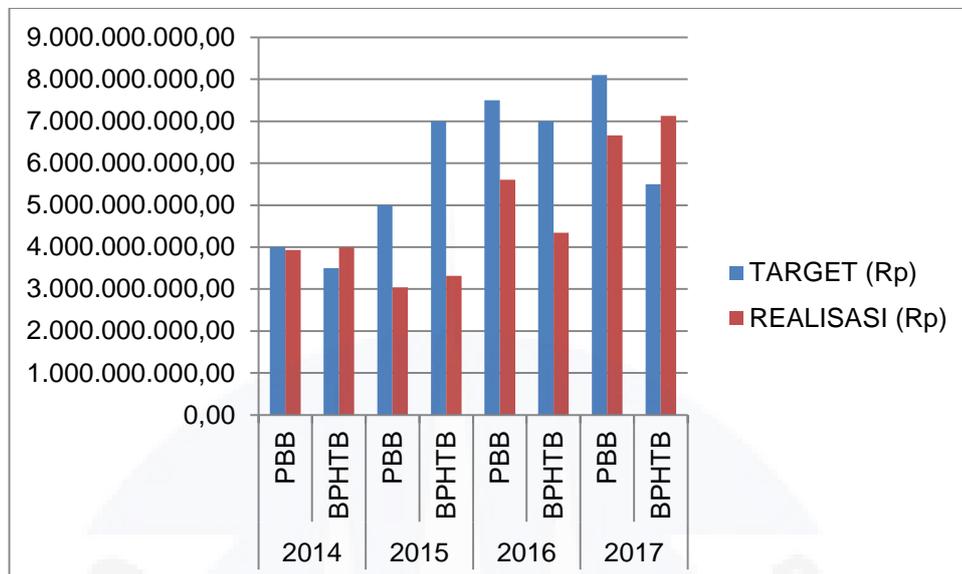
TAHUN	JENIS PAD	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)
2014	PBB	4.000.000.000,00	3.929.700.000,00
	BPHTB	3.500.000.000,00	3.991.800.000,00
2015	PBB	5.000.000.000,00	3.038.400.000,00
	BPHTB	7.000.000.000,00	3.317.500.000,00
2016	PBB	7.500.000.000,00	5.604.800.000,00
	BPHTB	7.000.000.000,00	4.342.300.000,00
2017	PBB	8.100.000.000,00	6.666.800.000,00
	BPHTB	5.500.000.000,00	7.128.000.000,00

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, Tahun 2018

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa tidak terdapat kenaikan atau peningkatan penerimaan secara signifikan. Meskipun penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P-2) mengalami peningkatan setiap tahunnya, penerimaan tersebut tidak selalu melebihi target, kecuali pada tahun 2015. Sama halnya dengan pajak bumi dan bangunan (PBB), pada penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) juga mengalami kenaikan selama 3 (tiga) tahun terakhir meskipun tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2017, penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) realisasinya mencapai target.

Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai peningkatan atau kenaikan dari penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P-2) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bisa dilihat dari grafik dibawah ini:

Gambar I.2
Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan PBB P-2 dan BPHTB Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2014-2017



Sumber : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Bangka Tengah, Tahun 2018

Berdasarkan grafik 1.1 di atas, sudah jelas terlihat jika pada penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dari tahun 2014-2017 memang meningkat setiap tahunnya, tetapi tidak pernah mencapai target kecuali pada tahun 2015. Sama dengan penerimaan PBB, pada tahun 2015 penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menurun dari tahun sebelumnya. Penerimaan BPHTB ini juga tidak selalu mencapai target. Menurut Bapak Gunawan selaku Kepala Bidang Pajak Daerah, tidak tercapainya target dari realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ini dikarenakan banyaknya jumlah tunggakan dari masyarakat. Tunggakan ini disebabkan karena adanya masyarakat yang tidak melapor setelah memperbaiki rumah serta menambah bangunan mereka, dan juga lemahnya kesadaran masyarakat tentang pajak, bahkan masyarakat juga enggan mendaftarkan tanah dan bangunan yang mereka miliki ke pihak

yang bertanggungjawab atas hal tersebut. Beliau juga mengatakan bahwa untuk pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) dilakukan oleh perangkat desa dimasing-masing wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa warga di beberapa desa di Bangka Tengah, mereka mengatakan bahwa mereka kecewa karena pihak pemerintah tidak melakukan pemungutan secara langsung. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa mereka telah membayar rutin pajak bumi dan bangunan (PBB) tetapi kemudian untuk penagihan selanjutnya mereka harus membayar 2 (dua) kali lipat karena pada pendataan sebelumnya warga tersebut terdata belum melakukan pembayaran.

Dari latar belakang yang telah dituliskan diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat penelitian mengenai pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P-2) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Kabupaten Bangka Tengah yang peneliti tuangkan dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Tengah Periode 2014-2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan penelitian yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2013 : 88). Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran dari penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P-2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bangka Tengah Periode 2014-2017 ?
2. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P-2) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bangka Tengah periode 2014-2017 ?
3. Bagaimana pengaruh penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bangka Tengah periode 2014-2017 ?
4. Bagaimana pengaruh secara simultan antara pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P-2) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bangka Tengah periode 2014-2017 ?
5. Bagaimana kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P-2) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bangka Tengah periode 2014-2017 ?

1.3 Batasan Masalah

Dikarenakan adanya keterbatasan waktu dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti hanya melakukan pembatasan penelitian pada :

1. Data yang diambil berupa data target dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Bangka Tengah dalam kurun waktu 4 tahun.
2. Penelitian ini hanya akan membahas mengenai pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P-2) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bangka Tengah tahun 2014-2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ditetapkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P-2), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bangka Tengah Periode 2014-2017.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB P-2) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bangka Tengah periode 2014-2017.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bangka Tengah Periode 2014-2017.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P-2), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) secara simultan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bangka Tengah periode 2014-2017.
5. Untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bangka Tengah periode 2014-2017.

1.5 Manfaat Penelitian

Setelah dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang Ekonomi dan Pemerintahan, khususnya pada bidang keuangan daerah. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dalam pengelolaan

pajak daerah dan juga pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bangka Tengah.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini nantinya diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan Pemerintah atau Instansi terkait dalam membuat kebijakan mengenai penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Bangka Tengah.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan pembahasan pada setiap bab yang bertujuan untuk mempermudah pembahasan masalah. Dalam penelitian ini terdapat 5 (lima) bab yang akan dibahas, antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan diuraikan beberapa definisi serta beberapa pendapat para ahli atau peneliti terdahulu pengaruh serta kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta pendapatan asli daerah (PAD). Pada bab ini juga akan dikemukakan kerangka pemikiran dan juga hipotesis dari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi waktu dan tempat penelitian, populasi dan sample, metode pengumpulan data, devinisi operasional variabel dan pengukuran variabel, serta metode analisis data dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang sejarah singkat perusahaan / instansi yang menjadi tempat objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan yang berkaitan dengan pengaruh dan kontribusi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P-2), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka Tengah periode 2014-2017.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian ini dan juga saran sebagai bahan masukan untuk perusahaan / instansi yang diteliti oleh peneliti.